



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 272 /PMK.05/2014
TENTANG
PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN
ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ILUSTRASI FORMAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Periode yang Berakhir s.d. (1)
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (2)
UNIT ORGANISASI/ESELON I : (3)
WILAYAH /PROVINSI : (4)
SATUAN KERJA : (5)
JENIS KEWENANGAN : (6)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REAL DI ATAS (BAWAH)	% REAL ANGGARAN
PENDAPATAN NEGARA				
PENERIMAAN NEGARA	xxx	xxx	xxx	xx.xx
penerimaan perpajakan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
penerimaan negara bukan pajak	xxx	xxx	xxx	xx.xx
HIBAH	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	xxx	xxx	xxx	xx.xx
BELANJA NEGARA				
Rupiah Murni	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Bunga				
Utang	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pinjaman dan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Bunga				
Utang	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	xx.xx
PEMBIAYAAN				
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Perbankan Dalam				
Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	xxx	xxx	xxx	xx.xx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)				
Penarikan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xx.xx

....., (7)
..... (8)

(9)

..... (10)
NIP. (11)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN LRA

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi kota dan tanggal
8	Diisi nomenklatur jabatan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
9	Diisi tanda tangan pejabat Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
10	Diisi nama pejabat Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
11	Diisi NIP pejabat Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

ILUSTRASI FORMAT
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir s.d. (1)
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (2)
UNIT ORGANISASI/ESELON I : (3)
WILAYAH /PROVINSI : (4)
SATUAN KERJA : (5)
JENIS KEWENANGAN : (6)

URAIAN	JUMLAH	kenaikan (penurunan)	
	per 20X1 (7)	jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Bea Keluar	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Pendapatan Perpajakan	xxx	xxx	xx.xx
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx	xx.xx
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xx.xx
BEBAN OPERASIONAL			
Beban pegawai	xxx	xxx	xx.xx
Beban persediaan	xxx	xxx	xx.xx
Beban jasa	xxx	xxx	xx.xx
Beban pemeliharaan	xxx	xxx	xx.xx
Beban perjalanan dinas	xxx	xxx	xx.xx
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat	xxx	xxx	xx.xx
Beban bunga	xxx	xxx	xx.xx
Beban subsidi	xxx	xxx	xx.xx
Beban hibah	xxx	xxx	xx.xx
Beban bantuan sosial	xxx	xxx	xx.xx
Beban penyusutan dan amortisasi	xxx	xxx	xx.xx
Beban penyisihan piutang tak tertagih	xxx	xxx	xx.xx
Beban transfer	xxx	xxx	xx.xx
Beban lain-lain	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xx.xx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xx.xx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xx.xx
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xx.xx
SURPLUS/DEFISIT PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xx.xx
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xx.xx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xx.xx
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xx.xx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xx.xx
Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xx.xx
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xx.xx
SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xx.xx

..... (8)
PA/KPA (9)

(10)

..... (11)
NIP. (12)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PETUNJUK PENGISIAN LO

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi kota dan tanggal
8	Diisi nomenklatur jabatan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
9	Diisi tanda tangan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
10	Diisi nama Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
11	Diisi NIP Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

ILUSTRASI FORMAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir s.d. (1)
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN (2)
UNIT ORGANISASI/ESELON I (3)
WILAYAH/PROVINSI (4)
SATUAN KERJA (5)
JENIS KEWENANGAN (6)

URAIAN	JUMLAH	kenaikan (penurunan)	
	Periode s.d. 20X1	jumlah	%
EKUITAS AWAL			
SURPLUS/DEFISIT LO	xxx	xxx	xx.xx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	xxx	xxx	xx.xx
Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx	xx.xx
Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx	xx.xx
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	xxx	xx.xx
Lain-lain	xxx	xxx	xx.xx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxx	xxx	xx.xx
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	xxx	xxx	xx.xx
EKUITAS AKHIR	xxx	xxx	xx.xx

....., (7)

..... (8)

(9)

..... (10)

NIP. (11)

f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PETUNJUK PENGISIAN LPE

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi kota dan tanggal
8	Diisi nomenklatur jabatan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
9	Diisi tanda tangan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
10	Diisi nama pejabat Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
11	Diisi NIP Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

ILUSTRASI FORMAT
NERACA PENUTUP
PER (1)
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (2)
UNIT ORGANISASI/ESELON I : (3)
WILAYAH /PROVINSI : (4)
SATUAN KERJA : (5)
JENIS KEWENANGAN : (6)

URAIAN	JUMLAH		kenaikan (penurunan)	
	Per 20X1 (7)	Per 31 Des 20X0	jumlah	%
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Di Muka	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Uang Muka Belanja	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Piutang Bukan Pajak	xxx	xxx	xxx	xx.xx
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Piutang Bukan Pajak - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bagian Lancar TPA	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar TPA	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Bagian Lancar TPA - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bagian Lancar TP/TGR	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar TP/TGR	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Bagian Lancar TP/TGR - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx	xxx	xx.xx
ASET TETAP				
Tanah	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx	xxx	xx.xx
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx	xxx	xx.xx
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Penjualan	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Tagihan Penjualan Angsuran - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Tagihan TP/TGR	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Tagihan TP/TGR - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Piutang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Piutang Jangka Panjang Lainnya - Neto	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Piutang Jangka	xxx	xxx	xxx	xx.xx
ASET LAINNYA				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Aset Tak Berwujud	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Dana Yang Dibatasi	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Aset Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH ASET	xxxx	xxxx	xxxx	xx.xx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Biaya Pinjaman	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Kewajiban Jangka	xxx	xxx	xxx	xx.xx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Utang Dalam Negeri-Perbankan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Utang Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Premium (diskonto) Obligasi	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Kewajiban Jangka	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx	xxx	xx.xx
EKUITAS				
EKUITAS	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxxx	xxxx	xxxx	xx.xx

.....(8)
PA/KPA (9)

(10)

..... (11)
NIP. (12)

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11.-

PETUNJUK PENGISIAN NERACA PENUTUP

No	Uraian Isian
1	Diisi tanggal likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian unit organisasi
4	Diisi Kode dan uraian wilayah/propinsi
5	Diisi Kode dan uraian satuan kerja
6	Diisi Kode dan uraian jenis kewenangan
7	Diisi saldo per tanggal likuidasi
8	Diisi kota dan tanggal
9	Diisi nomenklatur jabatan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
10	Diisi tanda tangan Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
11	Diisi nama Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
12	Diisi NIP Pemimpin Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(nama bagian anggaran)
(nama unit organisasi/eselon I)
(nama UAKPB)

ILUSTRASI
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (LBKP) PENUTUP
GABUNGAN INTRAKOM TABEL DAN EKSTRAKOM TABEL
PER (1)

Identitas dan Nama UAKPB : (2) tanggal :
halaman :

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 JAN 20XX		MUTASI				SALDO PER TANGGAL LIKUIDASI	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
TOTAL										

....., (3)
Penanggung Jawab UAKPB
..... (4)

(5)

..... (6)
NIP. (7)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

PETUNJUK PENGISIAN LBKP PENUTUP

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal likuidasi
2	Diisi identitas dan nama Entitas Akuntansi yang dilikuidasi
3	Diisi kota dan tanggal
4	Diisi nomenklatur jabatan penanggung jawab UAKPB
5	Diisi tanda tangan pejabat penanggung jawab UAKPB
6	Diisi nama pejabat penanggung jawab UAKPB
7	Diisi NIP pejabat penanggung jawab UAKPB

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(nama bagian anggaran)

ILUSTRASI
LAPORAN BARANG PENGGUNA (LBP) PENUTUP
GABUNGAN INTRAKOM TABEL DAN EKSTRAKOM TABEL
PER (1)

tanggal :

halaman :

Identitas dan Nama UAKPB : (2)

[illegible]

....., (3)

Penanggung Jawab UAPB

..... (4)

(5)

..... (6)

NIP. (7)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PETUNJUK PENGISIAN LBP PENUTUP

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal likuidasi
2	Diisi identitas dan nama Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
3	Diisi kota dan tanggal
4	Diisi nomenklatur jabatan penanggung jawab UAPB
5	Diisi tanda tangan pejabat penanggung jawab UAPB
6	Diisi nama pejabat penanggung jawab UAPB
7	Diisi NIP pejabat penanggung jawab UAPB

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ILUSTRASI FORMAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir s.d. (1)
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (2)
UNIT ORGANISASI/ESELON I : (3)
WILAYAH /PROVINSI : (4)
SATUAN KERJA : (5)
JENIS KEWENANGAN : (6)

URAIAN	Periode s.d. 20X1 (7)				Periode s.d. 20X1 (8)			
	ANGGARAN	REALISASI	REAL DI ATAS (BAWAH)	% REAL ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REAL DI ATAS (BAWAH)	% REAL ANGGARAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
PENERIMAAN NEGARA	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
penerimaan perpajakan	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
penerimaan negara bukan pajak	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
HIBAH	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
BELANJA NEGARA								
Rupiah Murni	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Bunga								
Utang	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pinjaman dan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Bunga								
Utang	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Hibah	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
PEMBIAYAAN								
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Perbankan Dalam Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)								
Penarikan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xx.xx	xxx	xxx	xxx	xx.xx

..... (9)
..... (10)

(11)

..... (12)
NIP. (13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN LRA

No	Uraian Isian
1	Diisi tanggal penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi periode sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi (tanggal dinyatakan selesai proses likuidasi)
8	Diisi periode sampai dengan tanggal likuidasi
9	Diisi kota dan tanggal
10	Diisi nomenklatur jabatan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
11	Diisi tanda tangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
12	Diisi Nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
13	Diisi NIP Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

ILUSTRASI FORMAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir s.d. (1)
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : (2)
UNIT ORGANISASI/ESELON I : (3)
WILAYAH/PROVINSI : (4)
SATUAN KERJA : (5)
JENIS KEWENANGAN : (6)

URAIAN	JUMLAH		kenaikan (penurunan)	
	Periode s.d. 20X1 (7)	Periode s.d. 20X1 (8)	jumlah	%
EKUITAS AWAL				
SURPLUS/DEFISIT LO	xxx	xxx	xxx	xx.xx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN				
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Koreksi Nilai Aset Tetap Non	xxx	xxx	xxx	xx.xx
Revaluasi				
Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx.xx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxx	xxx	xxx	xx.xx
KENAIKAN/PENURUNAN	xxx	xxx	xxx	xx.xx
EKUITAS				
EKUITAS AKHIR	0	xxx	xxx	xx.xx

....., (9)
..... (10)

(11)
..... (12)
NIP. (13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETUNJUK PENGISIAN LPE

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi periode sampai dengan tanggal Laporan Keuangan Likuidasi (tanggal dinyatakan selesai proses likuidasi)
8	Diisi periode sampai dengan tanggal Laporan Keuangan Penutup (tanggal dinyatakan dilikuidasi)
9	Diisi kota dan tanggal
10	Diisi nomenklatur jabatan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
11	Diisi tanda tangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
12	Diisi Nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
13	Diisi NIP Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

ILUSTRASI FORMAT
NERACA LIKUIDASI
PER (1)
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : (2)
UNIT ORGANISASI/ESELON I : (3)
WILAYAH / PROVINSI : (4)
SATUAN KERJA : (5)
JENIS KEWENANGAN : (6)

URAIAN	JUMLAH		kenaikan (penurunan)	
	Per 20X1 (7)	Per 20X1 (8)	jumlah	%
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Di Muka	0	xxx	xxx	xx.xx
Uang Muka Belanja	0	xxx	xxx	xx.xx
Piutang Bukan Pajak	0	xxx	xxx	xx.xx
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak)	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Piutang Bukan Pajak - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Bagian Lancar TPA	0	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar TPA	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Bagian Lancar TPA - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Bagian Lancar TP/TGR	0	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Bagian Lancar TP/TGR - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Persediaan	0	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Aset Lancar	0	xxx	xxx	xx.xx
ASET TETAP				
Tanah	0	xxx	xxx	xx.xx
Peralatan dan Mesin	0	xxx	xxx	xx.xx
Gedung dan Bangunan	0	xxx	xxx	xx.xx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	xxx	xxx	xx.xx
Aset Tetap Lainnya	0	xxx	xxx	xx.xx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	xxx	xxx	xx.xx
Akumulasi Penyusutan	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Jumlah Aset Tetap	0	xxx	xxx	xx.xx
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	0	xxx	xxx	xx.xx
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Penjualan)	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Tagihan Penjualan Angsuran - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Tagihan TP/TGR	0	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Tagihan TP/TGR - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	xxx	xxx	xx.xx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka	0	(xxx)	(xxx)	xx.xx
Piutang Jangka Panjang Lainnya - Neto	0	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Piutang Jangka Panjang	0	xxx	xxx	xx.xx
ASET LAINNYA				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	xxx	xxx	xx.xx
Aset Tak Berwujud	0	xxx	xxx	xx.xx
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	xxx	xxx	xx.xx
Aset Lain-Lain	0	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Aset Lainnya	0	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH ASET	0	xxxx	xxxx	xx.xx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Biaya Pinjaman	0	xxx	xxx	xx.xx
Pendapatan Diterima Dimuka	0	xxx	xxx	xx.xx
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	xxx	xxx	xx.xx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Luar Negeri	0	xxx	xxx	xx.xx
Utang Dalam Negeri-Perbankan	0	xxx	xxx	xx.xx
Utang Dalam Negeri-Obligasi	0	xxx	xxx	xx.xx
Premium (diskonto) Obligasi	0	xxx	xxx	xx.xx
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	xxx	xxx	xx.xx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH KEWAJIBAN	0	xxx	xxx	xx.xx
EKUITAS				
EKUITAS	0	xxx	xxx	xx.xx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	xxxx	xxxx	xx.xx

..... (9)
..... (10)

(11)

..... (12)
NIP. (13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PETUNJUK PENGISIAN NERACA LIKUIDASI

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal penyusunan neraca likuidasi
2	Diisi Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
3	Diisi Kode dan uraian Unit Organisasi
4	Diisi Kode dan uraian Wilayah/Propinsi
5	Diisi Kode dan uraian Satuan Kerja
6	Diisi Kode dan uraian Jenis Kewenangan
7	Diisi saldo per tanggal Laporan Keuangan Likuidasi (tanggal dinyatakan selesai proses likuidasi)
8	Diisi saldo per tanggal likuidasi
9	Diisi kota dan tanggal
10	Diisi nomenklatur jabatan Penanggung jawab proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
11	Diisi tanda tangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
12	Diisi Nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
13	Diisi NIP Penanggung jawab proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(nama bagian anggaran)
(nama unit organisasi/eselon I)
(nama UAKPB)

ILUSTRASI
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (LBKP) LIKUIDASI
GABUNGAN INTRAKOMTABEL DAN EKSTRAKOMTABEL
PER (1)

Identitas dan Nama UAKPB : (2) tanggal :
halaman :

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER TANGGAL LIKUIDASI		MUTASI				SALDO PER TGL PENYUSUNAN LK LIKUIDASI	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
TOTAL										

....., (3)
Penanggung Jawab Proses Likuidasi/
Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

(4)

..... (5)
NIP. (6)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PETUNJUK PENGISIAN LBKP LIKUIDASI

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal penyusunan LBKP Likuidasi
2	Diisi identitas dan nama Entitas Akuntansi yang dilikuidasi
3	Diisi kota dan tanggal
4	Diisi tanda tangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
5	Diisi nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
6	Diisi NIP Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(nama bagian anggaran)

ILUSTRASI
LAPORAN BARANG PENGGUNA (LBP) LIKUIDASI
GABUNGAN INTRAKOMTABEL DAN EKSTRAKOMTABEL
PER (1)

tanggal :
halaman :

Identitas dan Nama UAPB : (2)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER TANGGAL LIKUIDASI		MUTASI				SALDO PER TGL PENYUSUNAN LK LIKUIDASI	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
TOTAL										

....., (3)
Penanggung Jaw ab Proses Likuidasi/
Pejabat Penanggung Jaw ab Likuidasi

(4)

..... (5)
NIP. (6)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PETUNJUK PENGISIAN LBP LIKUIDASI

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi tanggal penyusunan LBP Likuidasi
2	Diisi identitas dan nama Entitas Pelaporan yang dilikuidasi
3	Diisi kota dan tanggal
4	Diisi tanda tangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
5	Diisi nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi
6	Diisi NIP Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PENUTUP

1. Tingkat Entitas Akuntansi

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Penutup Satuan Kerja <nama Entitas Akuntansi yang dilikuidasi> selaku Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca Penutup, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Penutup)

Laporan Keuangan Penutup tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

nama kota>, <tgl-bln-thn>
<Pemimpin Entitas Akuntansi
yang dilikuidasi>

(.....)

2. Tingkat Entitas Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Penutup <nama Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi> tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Entitas Akuntansi terlikuidasi merupakan tanggung jawab pemimpin Entitas Akuntansi.

(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Penutup)

Laporan Keuangan Penutup tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<nama kota>, <tgl-bln-thn>
<Penanggung jawab UAPPA-W>

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Tingkat Entitas Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Penutup <nama Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi> tingkat Eselon I selaku UAPPA-EI yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Entitas Akuntansi terlikuidasi merupakan tanggung jawab pemimpin Entitas Akuntansi.

(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Penutup)

Laporan Keuangan Penutup tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<nama kota>, <tgl-bln-thn>
<Penanggung jawab UAPPA-EI>

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Tingkat Pengguna Anggaran

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Penutup <nama Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi> selaku Entitas Pelaporan yang dilikuidasi, terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca Penutup, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Penutup)

Laporan Keuangan Penutup tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<nama kota>, <tgl-bln-thn>
<Menteri/Pimpinan Lembaga>

(.....)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 272 /PMK.05 /2014
TENTANG
PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN
ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN LIKUIDASI

1. Tingkat Entitas Akuntansi

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Likuidasi Satuan Kerja <nama Entitas Akuntansi yang dilikuidasi> selaku Entitas Akuntansi yang dilikuidasi , terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca Likuidasi, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi)

Laporan Keuangan Likuidasi tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<nama kota>, <tanggal-bulan-tahun>
Penanggung Jawab Proses Likuidasi/
Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Tingkat Pengguna Anggaran

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Likuidasi <nama Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi> selaku Entitas Pelaporan yang dilikuidasi, terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca Likuidasi, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

(Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi)

Laporan Keuangan Likuidasi tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<nama kota>, <tanggal-bulan-tahun>
Penanggung Jawab Proses Likuidasi/
Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi

(.....)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

